PEMBELIAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

**Robi Cahyadi Kurniawan 1,**

**1** Mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

**Abstrak**

Pemungutan suara dalam pemilihan, pemilihan umum dan pemilihan lokal merupakan fenomena yang terus terjadi dalam politik Indonesia, terutama sejak pemilihan langsung tahun 2004. Orang yang lebih mengenal istilah voting buying dan money politics semakin sering, terutama di Pemilihan umum tingkat lokal (pemilihan), provinsi Lampung telah menerapkan pemilihan langsung secara bersamaan pada bulan Desember 2015 dan Februari 2017 yang lalu. Studi ini mencoba menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh keputusan pembelian suara yang mengubah pemilih dalam tiga pemilihan di Provinsi Lampung.

Studi ini merupakan hasil gabungan dari tiga studi berbeda namun mengkhususkan diri pada beberapa titik hasil penelitian mengenai fenomena pembelian suara atau money politics. Objek penelitian yang dilakukan di dua kabupaten dan satu kota, yaitu Kecamatan Way Kanan pada bulan Juli 2014, Kabupaten Pringsewu pada bulan Februari 2016 dan kota Bandar Lampung pada bulan November 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan survei dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Survei dilakukan terhadap 662 responden di setiap kabupaten dan kota yang menjadi obyek survei. Kecamatan, desa atau lingkungan perkotaan dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan jumlah pemilih berdasarkan data dari daftar pemilih tetap di masing-masing daerah.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemilih percaya bahwa pembelian suara akan terjadi dalam pemilihan lokal simultan pada tahun 2015 dan pemilihan lokal di tahun 2017 bersamaan dengan persentase kepercayaan pemilih yang besar. Pemilih dapat dipengaruhi pilihannya jika diberi bekal barang atau bekal uang. Hubungan atau hubungan patron-klien antara kandidat dan pemilih terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, uang proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan calon penggalangan dana.

Kata kunci: perolehan suara, perilaku pemungutan suara, hubungan patron-klien

**PENDAHULUAN**

Pemilu sebagai representasi demokrasi merupakan peristiwa penting yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Persaingan dalam memenangkan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Cara demokratis biasanya dilakukan dengan menjual visi, misi, program dan kegiatan calon kepala daerah. Cara lain adalah menggunakan track record atau rekam jejak yang baik dan bisa dilihat dan dirasakan masyarakat sebagai pilihan bijak dalam memilih keputusan yang diambil. Namun, ada banyak kandidat yang menggunakan kotor berarti dengan kampanye kotor dan penggunaan cara beli suara dengan cara yang baik untuk uang atau barang kepada calon pemilih.

Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang dan fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya money politics dalam berbagai pemilihan di Indonesia tidak gagal melakukan penilaian terhadap proses demokrasi di negeri ini. Indonesia setelah orde baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi baru (Platzdasch, 2009: 2), bahkan demokrasi baru (Bird and Hill, 2007: 17). Belakangan Indonesia lebih dikategorikan sebagai transisi demokrasi. Mietzner (Bunted an Ufen, 2009: 124) mengatakan bahwa Indonesia mengarah pada rezim demokrasi dengan kualitas rendah atau demokrasi yang berkualitas rendah.

Henk Schulte Nordholt (di Harris, dkk, 2005: 29) menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah agar pemerintah daerah lebih demokratis justru menegaskan budaya patrimonial. Pendapat lain menyimpulkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal ikut memperkaya praktik premanisme (Hadiz, 2010: 119; Harris, et al., 2005: 51). Hadiz (2010: 120) menyimpulkan bahwa politik uang dalam berbagi bentuknya telah menjadi permainan politik utama di kota dan desa di Indonesia saat ini.

Studi tentang perilaku pemilih di Indonesia telah dilakukan, baik selama orde baru (antara lain: Mulkan, 1989, Ghaffar, 1992; Kristiadi, 1996) dan memposting orde baru (seperti Taqwa, 2004; Liddle and Saiful Mujani 2007 & 2010). Namun penelitian tersebut, studi tersebut nampaknya bukan yang secara eksplisit berfokus pada pembahasan hubungan antara perilaku pemungutan suara dan uang politik.

Studi tentang perilaku pemungutan suara secara umum mempelajari bagaimana pemilih membuat pilihan dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan seleksi. Model teorinya didasarkan pada tiga faktor utama yang mempengaruhi pemilih (model 2004), model sosial psikologis, model pilihan rasional (model pilihan rasional), model sosiologis (model sosiologis) . Model sosiologis perilaku pemungutan suara adalah perilaku yang menempatkan faktor sosiologis seperti kesamaan asal negara, agama, dan jenis kelamin. Memprioritaskan model psiko-sosial kedekatan dengan partai politik tertentu. Sementara model pilihan rasional memprioritaskan keuntungan yang didapat oleh pemilih dan kelompoknya (Evan, 2004: 13)

Ketiga model perilaku pemungutan suara di atas pada dasarnya dikategorikan berdasarkan faktor-faktor yang menentukan perilaku pemungutan suara (voting determinants) seseorang atau kelompok orang (lihat Niemi 2008: 13-15; Evans, 2004; 6-89; Heywood, 2007: 265- 269; Liddle dan Mujani, 2007). Namun, selain kategorisasi ke dalam model ini, perilaku pemungutan suara juga sering ditangani melalui konsep: (1) pemenuhan pemilih atau kepatuhan pemilih (Schaffer, 2005: 3-4; Schaffer, 2007: 17-29); (2) loyalitas pemilih atau loyalitas pemilih (Hirschman, 1970; Anderson dan Srinivasan, 2003; Evans, 2004; Bratton, 2008: 15; Bartels, 2008; 14; Scaffer, 2007: 185); (3) keputusan untuk memilih atau memilih pilihan (lihat pujian seorang Redlawsk, 2006: 3-8; Evans, 2004: 4; Vicente 2007: 18; Woshinsky, 2008: 102-132; Zulkerman, 2005; 229)

Berdasarkan referensi sebelumnya, penulis berkeyakinan bahwa penting untuk melakukan studi khusus mengenai hubungan antara perilaku voting dan uang politik. Indikasi politik uang sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi berkualitas dan pemerintahan yang bersih perlu dipelajari secara mendalam. Dari 118 negara demokrasi di dunia, Indonesia masih dianggap sebagai negara kelompok yang memiliki transparansi rendah dalam pengelolaan dana kampanye pemilihan (Ward, 2003; 30.)

Praktik politik uang didasarkan pada dua sub variabel, yaitu pemahaman politik uang dan pengalaman pemilih terkait politik uang (lihat Brusco, et al, 2004: 69; Schaffer, 2004: 84; Vicente 2007: 14; juga Lingkaran Survey Indonesian, 2010: 14). Sepertinya sesuai dengan pendapat Woshinsky (2008: 132) bahwa keputusan untuk memilih dalam sebuah kontes politik pada akhirnya ditentukan oleh pengalaman dan pemahaman pemilih itu sendiri.

Sejauh ini pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilihan tetap menjadi teka-teki (Kramon, 2009: 1). Karena alasan semacam itu, pemilihan bersifat sukarela dan rahasia sehingga pemberi uang atau materi sebenarnya tidak dapat mengendalikan pilihan pemilih secara politis (Stokes, 2005: 315). Namun, pendapat lain menyatakan, pengaruh uang terhadap proses politik berbeda di setiap komunitas, tergantung pada karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan (Schaffer, 2005).

Studi tentang perilaku pembelian suara di Indonesia masih terbatas. Sejauh pendalaman penulis, studi tentang hubungan antara politik uang bukanlah perhatian khusus para peneliti tadi. Sebut di antara studi Rifai (2003) yang mengumpulkan tuduhan politik uang dalam pemilihan gubernur di beberapa daerah melalui media massa, namun tidak cukup rinci untuk melakukan penggalian. Demikian juga Lesmana yang memeriksa pemilihan gubernur langsung di Sumatera bagian barat dan Kepulauan Riau menyimpulkan bahwa praktik politik uang diyakini ada namun sangat sulit untuk dibuktikan (Hidayat, et al., 2007: 124). Studi serupa disampaikan Mietzner dalam kasus pemilihan di Sulawesi Utara, yang juga menyimpulkan hasil yang sama mengenai pengaruh politik uang yang kuat dalam pemilihan, dan tidak secara jelas menjelaskan hubungan antara uang politik dengan perilaku pemungutan suara (Bunte dan Ufen, 2009: 124-149).Studi Nurdin (2014) juga menjelaskan dengan baik tentang perilaku politik uang dalam pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 di Pandeglang. Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Bandung Barat (2014) tentang politik uang dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Studi lain juga dilakukan oleh KIP Aceh Bireuen (2015) mengenai politik uang pada Pemilu 2014.

Studi Barenscoot & Purba (2014) menggambarkan pembelian suara terjadi pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Hasilnya telah terjadi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan yang Sugar Group Company (SGC) dengan calon gubernur Lampung yaitu M Ridho Ficardo, menggunakan Pengaruh dan kekuatan uang, terutama gula di wilayah Lampung Lampung dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, para peneliti mencoba mencari jawaban tentang pembelian suara atau politik uang dalam konteks lokal, yaitu pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan hasil gabungan dari tiga studi yang berbeda namun mengkhususkan pada beberapa titik hasil penelitian mengenai fenomena pembelian suara atau money politics. Objek penelitian dilakukan di dua kabupaten dan satu kota, yaitu Way Kanan pada bulan Juli 2014, Kabupaten Pringsewu pada bulan Februari 2016 dan kota Bandar Lampung pada bulan November 2015.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan survei dengan menggunakan metode stratified random sampling.Survei dilakukan terhadap 662 responden di setiap kabupaten dan kota yang menjadi obyek survei. Kecamatan, desa atau lingkungan perkotaan dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan jumlah pemilih berdasarkan data dari daftar pemilih tetap di masing-masing daerah.

Sampel yang diambil dari survei ini berdasarkan rumus nomogram Hery King (dalam Sugiyono, 2010: 98) untuk populasi sekitar 1.000.0000 sampel jiwa yang diambil adalah minimal 662 responden untuk mendapatkan keakuratan tingkat survei atau error antara 1% Sampai 5%. Semua sub-sampel di kabupaten / kota yang menjadi objek studi penelitian. Setiap kabupaten akan terbagi menjadi 2 sampai 5 desa / sub terpilih dengan urutan terbesar dalam daftar pemilih akhir di kabupaten / kota yang menjadi objek penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik uang adalah istilah khusus untuk Indonesia. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik-round money dalam pelaksanaan pemilihan umum. Yakni pemilih diharapkan lebih banyak uang lebih mahal untuk mau memilih kandidat tertentu, ketimbang melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalamannya di posisi politik. Uang istilah politik sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai money politics, istilah yang hampir tidak dikenal dalam literatur politik di luar Indonesia.Secara akademis, konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena politik uang di Indonesia adalah pembelian suara (bahasa Inggris), yang secara harfiah berarti pembelian yang masuk akal. Istilah lain yang biasa digunakan untuk pembelian suara adalah Compra de votos (Spanyol), achat de voix (Prancis) dan stimmenkauf (Jerman) (Schaffer, 2007: 17)

Pembelian Vote memiliki berbagai arti dan sering dipahami dalam konteks yang berbeda di beberapa negara, bergantung pada berbagai faktor seperti budaya, tradisi politik dan pemilihan model (Schaffer, 2007: 25). Misalnya dalam politik Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks uang menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, uang politik dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Forest and Teresita, 2000: 94).

Salah satu definisi Vote yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah 'pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi "(dalam Heidenheimer, et al, 1989; 287) atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Bryan 2005 : 4). Kedua pengertian di atas adalah membeli suara yang menekankan pada tujuan, yaitu untuk mendapatkan konten yang dipersonalisasi atau secara langsung kepada pemilih sebagai pertukaran dengan dukungan politik.

Definisi yang hampir sama yang diberikan oleh Fox, yang menafsirkan perolehan suara sebagai "pertukaran hak politik untuk keuntungan material (Fox, 1994; 151-184). Dapat terjadi dalam pemilihan dan juga dalam persaingan dari politik non-elektoral. Fox tidak terlalu peduli dengan Tujuan pembelian suara, namun lebih memperhatikan aspek pertukaran antara bahan pendukung politik.

Dalam konteks Indonesia, Supriyanto (2005: 3) menyajikan dua pemahaman politik tentang uang. Perasaan pertama mengacu pada praktik politik uang, yang dia sebut 'pertukaran dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik'. Pemahaman terhadap praktik money politics yang jauh lebih istimewa, yaitu 'memilih secara langsung kepada pemilih, berbentuk bentuk biaya transportasi kampanye, jatah membagi uang / barang, distribusi makanan atau semen untuk membangun tempat ibadah, penyerbuan fajar dan Lainnya Definisi pertama mengacu pada acara atau kompetisi politik non-elektoral, yang tidak secara langsung melibatkan peilih. Definisi kedua jelas menunjuk pada pemilihan umum dengan pelaku politik lebih banyak uang, kandidat politik dan pemilih, namun dengan bentuk transaksi yang lebih beragam.

Dalam konteks pemilihan, pelaku politik uang dapat dilibatkan setidaknya lima partai memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu; Pemilih, kandidat, partai politik, administrasi pemilihan, dan penyandang dana (pengusaha, donor). Barang dipertukarkan baik secara tunai maupun bahan lainnya untuk ditukar dengan posisi, keputusan kebijakan atau politik (Supriyanto; 2005: 3)

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan (2007; 67) sebagai "partai-partai yang menggerogoti uang dari calon calon '.

Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara.Tujuannya adalah untuk menambahkan suar ke cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dan kampanye dengan tim membentuk pembelian yang masuk akal. Calon peserta kontes atau membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan (Supriyanto, 2005: 4)

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pembelian suara harus dianggap sebagai praktik ilegal dalam kontes politik di Negara Bagian (Ward, et al, 2003: 2). Alasan pertama, pembelian suara paling mendasar dinilai mengurangi penerapan prinsip keadilan dalam pemilihan. Rasionalitas pemilih dalam menilai kualitas calon (individu atau partai politik) bisa terganggu. Peserta menawarkan iming-iming uang atau materi lainnya. Ketidakadilan terjadi karena pemilih memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda satu sama lain. Argumen ini didasarkan pada studi Buchanan dan Tullock (1990: 27-274), yang menggambarkan hubungan antara kelayakan ekonomi dan keterampilan politik dari perspektif pemilih.

Alasan kedua; Pembelian suara dianggap mencemari proses pemilihan sehingga mempengaruhi keseluruhan kualitas demokrasi. Daya tawar uang dapat membuat pemilih mengabaikan evaluasi indikator objektif (Ward, et al, 2003: 5).

Alasan ketiga lebih praktis, penggunaan uang yang tidak legal bisa mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman di sejumlah negara Afrika Barat menunjukkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli suara berasal dari penyelundupan dan penghindaran Rakek yang tidak sah (Vicente dan Wantchekon, 2009: 17). Di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina dan Thailand, politik uang sering dikaitkan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Austin, 2004: 55-67) bahkan di Amerika Latin praktik jual-beli Suara yang dilakukan oleh kartel obat bius mencoba menempatkan orang di jabatan publik melalui pemilihan umum (Hodess, 2004: 76-82)

Schaffer (2008: 198) mengatakan setidaknya ada empat jenis motivasi di antara para pemilih mengapa mereka menerima tawaran politik uang. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi jangka pendek para pemilih melihat keuntungan pribadi mereka bersifat langsung.Kedua rasa khawatir tentang kemungkinan pembalasan jika pemilih menolak tawaran politik uang. Ketiga, terkait rasa kewajiban pribadi mereka kepada broker (team success) ada pada politik uang, biasanya terdiri dari orang, teman, atau anggota keluarga.Keempat; Keyakinan bahwa politik uang merupakan tanda kebajikan atau bukti kesadaran calon pemilih. Motif ketiga dan keempat adalah satu penjelasan mengapa politik uang seringkali sulit dikeluarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (Schaffer, 2008: 198)

Uang Variety Politik yang ditawarkan atau diterima pemilih umumnya dapat dikelompokkan menjadi lima jenis; (1) uang tunai; (2) pakaian dan aksesoris (3) makanan pokok dan pendukung makanan; (4) bahan bangunan seperti semen, besi, batu bata dan sejenisnya;Dan (5) tawaran pekerjaan. Sedangkan aktor atau aktor

Dalam konteks Provinsi Lampung, sejak pemilihan daerah yang dilakukan pada tahun 2004 sampai sekarang, isu beli suara atau money politics mulai banyak terdengar sejak tahun 2014, saat pemilihan gubernur Lampung dan pemilihan legislatif secara bersamaan.Berdasarkan penelitian yang mencoba mengambil sampel lain untuk memberikan perspektif lain melalui penelitian di kabupaten dan kota. Pada pemilihan terakhir bulan Desember 2015 dilakukan serentak di delapan kabupaten / kota di Provinsi Lampung, peneliti mengambil dua pemilihan sebagai obyek penelitian pilkada Bandar Lampung dan pemilihan Way Kanan. Untuk pemilihan lokal simultan pada bulan Februari 2017, peneliti mengambil objek pemilihan di Kabupaten Pringsewu. Survei ketiga dilakukan sebelum pemilihan berlangsung, dan sebagai bagian terpisah dari survei pemetaan pemilu yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Bagian khusus dari survei pemetaan yang membahas tentang politik pembelian suara dan uang menjadi pembahasan dalam makalah ini.

Tabel 1. Harapan pemilih saat mengikuti kampanye pemilihan di Pilwakot Bandar Lampung 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | Visi, misi dan program kerja | 237 | 35,8% |
| **2** | Penyediaan barang | 45 | 6,8% |
| **3** | Memberi uang (money politics) | 57 | 8,6% |
| **4** | Kontrak Politik | 63 | 9,5% |
| **5** | Hiburan (lagu, dangdut) | 221 | 33,4% |
| **6** | Foto (selfie) dengan kandidat | 39 | 5,9% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di Kota Bandar Lampung, November 2015

Penyediaan barang sebesar 6,8% dari total responden, pemberian uang sebesar 8,6% dari total responden, bila digabungkan, jumlahnya 15,4% dari total responden. Indikasi membeli suara dengan uang dan barang sebesar 15,4%. Potensi perubahan pemilihan pemilih politik dalam pemilihan daerah di Bandar Lampung dengan imbalan pemberian uang dan barang sebesar 15,4%. Indikasi ini cukup besar prediksi dapat ditingkatkan di Pilwakot Bandar Lampung.

Tabel 2. Model pembelian suara yang diyakini oleh responden akan terjadi di Pilwakot Bandar Lampung, Desember 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | Pembelian suara langsung (money politics) | 193 | 29,1% |
| **2** | Pemberian dari kandidat | 61 | 9,2% |
| **3** | Layanan dan kegiatan dari calon | 8 | 1,2% |
| **4** | Barang publik | 9 | 1,3% |
| **5** | Proyek *gentong babi* (proyek yang didanai oleh uang negara) | 17 | 2,6% |
| **6** | ***Kecurangan pemilu*** | ***313*** | ***47,3%*** |
| **7** | Penampilan identitas (berdasarkan agama dan etnisitas) | 5 | 0,8% |
| **8** | Penggalangan dana oleh calon | 40 | 6% |
| **9** | Semua terjadi (poin 1-8) | 16 | 2,4% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di Kota Bandar Lampung, November 2015

Dari data yang terkandung dalam tabel di atas mengejutkan bahwa kecurangan pemilihan dipilih oleh 47,3% responden, diikuti oleh perolehan suara sebesar 29,1%. Bagi responden, alasan mereka memilih jawaban tersebut adalah pengalaman Pilwakot di tahun 2010 dengan pemilihan gubernur 2014, di mana politik uang yang sangat kental terjadi. Ketakutan akan kecurangan Pemilu terjadi karena Lampung rawan kecurangan dengan beberapa komisaris KPUD yang dipecat, pengalaman pada pemilihan legislatif 2014. Responden tidak sepenuhnya percaya dengan kinerja Komisi Pemilu dan penyelenggara pemilihan karena Komite Pengawas traumatis masa lalu yang beberapa komisarisnya mengindikasikan komisaris distrik yang melanggar undang-undang dan mendapat sanksi dari DKPP pusat, mulai dari sanksi administratif sampai pemberhentian selama legislatif 2014 Pemilihan setahun yang lalu.

Tabel 3. Harapan pemilih saat mengikuti kampanye Pemilu di Way Kanan Pemilu 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | Program kerja calon | 88 | 13,3% |
| **2** | Penyediaan barang | 125 | 18,8% |
| **3** | Visi misi dan pemaparan calon | 129 | 19,5% |
| **4** | Politik uang (memberi uang) | 65 | 9,8% |
| **5** | Hiburan (lagu dangdut) | 248 | 37,4% |
| **6** | Lainnya | 7 | 1% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di KabupatenWay Kanan, Juli 2014

Pemilih di Way Kanan lebih tinggi dari pemilih di kota Bandar Lampung dalam hal perolehan suara. Pemilih yang mengharapkan penyediaan barang sebesar 18,8%, sedangkan yang mengharapkan diberi uang sebesar 9,8%. Total keduanya mencapai 28,6%. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding pemilih di Bandar Lampung yang hanya mencapai 15,4%. Angka yang diperoleh 28,6% dari responden menunjukkan pemilih di Way Kanan masih mempertimbangkan untuk memberikan uang dan barang sebagai barang yang wajar dan wajar dan harus dilakukan karena saat bergabung dalam kampanye karena tidak bekerja, dan mayoritas responden adalah usaha tani dan bertani. Kompensasi tidak bekerjanya mereka pada hari itu harus diganti dengan uang atau barang, dengan imbalan tersebut maka kehilangan penghasilan pada hari itu tidak dapat tergantikan.

Tabel 4. Model dari pembelian suara yang diyakini oleh responden akan terjadi di (Pilbup) Way Kanan pemilu lokal Desember 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | ***Pembelian suara langsung (money politics)*** | ***265*** | ***40%*** |
| **2** | Pemberian dari kandidat | 77 | 11,6% |
| **3** | Layanan dan kegiatan dari calon | 13 | 1,9% |
| **4** | Barang publik | 14 | 2,1% |
| **5** | Proyek *gentong babi* (proyek yang didanai oleh uang negara) | 22 | 3,3% |
| **6** | Kecurangan pemilu | 180 | 27,2% |
| **7** | Penampilan identitas (berdasarkan agama dan etnisitas) | 35 | 5,3% |
| **8** | Penggalangan dana calon | 29 | 4,4% |
| **9** | Semua terjadi (poin 1-8) | 27 | 4% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di distrik Way Kanan, Juli 2014

Pemilih di Way Kanan percaya bahwa pembelian suara akan terjadi saat pemilihan di Way Kanan. Keyakinan itu menyebabkan banyak kandidat yang sudah mulai gerilya saat melakukan survei, dan telah memberi banyak barang, mulai dari nasi, tepung, minyak goreng, gula, mukena, jilbab bahkan disisipkan uang ke dalam amplop tertutup. Keyakinan ini membuat responden mencapai 40%, itu akan terjadi saat pemungutan suara menjelang pemilihan di kabupaten Way Kanan. Posisi kedua kecurangan dalam pemilihan akan berlangsung yaitu 27,2% responden. Ini karena pemungutan suara tinggi, jadi bisa saja terjadi saat pelaksanaan kecurangan, yang dilakukan oleh panitia, mulai dari TPS dan KPPS sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 5. Harapan pemilih saat mengikuti kampanye pada PilBup Pringsewu 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | Program kerja calon | 113 | 17% |
| **2** | Penyediaan barang | 98 | 14,8% |
| **3** | Visi misi dan pemaparan calon | 148 | 22,3% |
| **4** | Politik uang (memberi uang) | 78 | 11,8% |
| **5** | Hiburan (lagu dangdut) | 212 | 32% |
| **6** | Lainnya | 13 | 1,9% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di Kabupaten Pringsewu, Februari 2016

Pemilih di kabupaten Pringsewu mengharapkan selama kampanye diberi barang (14,8%) dan diberi uang (11,8%) disamping alasan lainnya. Pembelian suara dengan menjumlahkan penyediaan barang dan penyediaan uang memberi angka 26,6%. Angka ini sedikit lebih kecil dari jumlah dikabupaten Way kanaK yaitu 28,6% . Kabupaten Pringsewu yang secara geografis sangat strategis dan ekonomis di provinsi Lampung ternyata konstituennya juga bisa terpengaruh oleh pemberian uang dan barang.

Tabel 6. Model pembelian suara yang diyakini oleh responden akan terjadi pada PilBup Pringsewu Februari 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORMASI** | **RESPONDEN** | **PERSENTASE** |
| **1** | ***Pembelian suara langsung (money politics)*** | ***143*** | ***21,6%*** |
| **2** | Pemberian dari kandidat | 89 | 13,4% |
| **3** | Layanan dan kegiatan dari calon | 24 | 3,6% |
| **4** | Barang publik | 32 | 4,8% |
| **5** | Proyek *gentong babi* (proyek yang didanai oleh uang negara) | 37 | 5,6% |
| **6** | Kecurangan Pemilu | 137 | 20,7% |
| **7** | Penampilan identitas (berdasarkan agama dan etnisitas) | 134 | 20,2% |
| **8** | Penggalangan dana calon | 30 | 4,5% |
| **9** | Semua terjadi (poin 1-8) | 36 | 5,4% |
|  | Total | 662 | 100% |

Sumber: Hasil survei di Kabupaten Pringsewu, Februari 2016

Pemungutan suara langsung dengan politik uang, baik barang maupun uang yang diyakini oleh pemilih di kabupaten Pringsewu akan terjadi dengan pilihan 21,6% responden. Responden melihat alasannya karena pelaksanaan pemilihan Pringsewu sebelumnya pada tahun 2012 telah terjadi. Puncak penyediaan barang seperti gula, tepung dan paket makanan juga marak saat pemilihan gubernur pada 2014. Berdasarkan peristiwa pemilihan lokal pada tahun 2012 dan 2014 yang membuat responden yakin bahwa pembelian suara akan terjadi di Pemilihan umum Pringsewu (pilbup) 2017.

**KESIMPULAN**

Mengapa politik uang terjadi dalam pemilihan di provinsi Lampung khususnya dalam pemilihan lokal simultan pada tahun 2015 dan 2017, penjelasannya adalah yang pertama; Pemahaman publik atau pemilih terhadap praktik politik uang belum jelas pembelian suara yang dipahami berbeda oleh aktor politik. Kedua; Kebiasaan, calon yang akan bertarung membawa pulang pemilih dengan membawa hadiah atau cinderamata yang dianggap memiliki sopan santun. Provinsi Lampung juga, jadi dianggap sebagai kebiasaan dan tradisi daripada sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Ketiga; Mungkin karena turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan, partai politik dan kandidat. Ketidakpercayaan masyarakat ini mendorong orang menjadi apatis terhadap mereka dan proses politik, sehingga mengharapkan sesuatu yang bermanfaat untuk dukungan politik yang diberikan.

Faktor yang paling penting adalah status sosio-ekonomi yang masih rendah, daerah dengan penduduk berpenghasilan rendah biasanya dijadikan target pembelian suara praktek. Dalam kasus di Way Kanan dan Pringsewu, status ekonomi orang-orang yang kebanyakan petani, pertanian mempengaruhi pergeseran politik mereka dalam memilih dengan imbalan uang atau barang. Hal ini juga terjadi di kota Bandar Lampung, meski tidak sebesar dua kabupaten lainnya dengan status ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pekerja swasta.

Pemilih dapat dipengaruhi pilihannya jika diberi bekal barang atau bekal uang. Hubungan antara kandidat patron klien dan pemilih terjadi dalam kasus pembelian, administrasi, layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan kelompok barang, uang proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan calon penggalangan dana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Austin, Reginald dan Tjernstrom, Maja (eds). 2004. *Buku Pegangan pendanaan dari Partai Politik dan Kampanye Pemilu.*Stockholm: Internasional IDEA

Budiarjo., Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Bunte, Marco dan Ufen, Andreas. 2009. *Demokratisasi di Post-Suharto Indonesia.* London: Routledge

Bryan, Shari dan Baer, ​​Denise. 2005. *Uang dalam Politik: Studi Praktek Pembiayaan Partai di 22 Negara.* Washington: Lembaga Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional (NDI)

Buchanan, James M dan Tullock, Gordon. *1999. Kalkulus Consent: Yayasan logis dari Demokrasi Konstitusional.* Indianapolis: Liberty Fund

Evans, Jocelyn A. 2004. *Pemilih dan Voting: Sebuah Pengantar.* London: Publikasi Sage.

Hutan, Liacco dan Teresita Dy. 2000. *Mengendalikan Illegal Pengaruh Politik Uang.* Washington DC: IFES

Hadiz, Vedi R .2010. *Melokalkan Power Post-Otoriter Indonesia: Sebuah Asia Tenggara Perspektif.* Stanford: Stanford University Press

Harriss, John, dkk. 2005. *Politisasi Demokrasi;* *The New lokal Politik Demokratisasi.* New York: Palgrave MacMillan

Heywood, Andrew. 2007. *Politik.* Edisi ketiga. New York: Yayasan Palgrave

Hirschman, Albert O. 1970. *Exit, Voice, dan Loyalitas.* Cambridge, MA: Harvard University Press

Hodess, Robin, dkk (eds) 2004. *Laporan Korupsi* Global *2004: Fokus Khusus Korupsi Politik,* Londeon: Transparency International

Lau, Richard R Dan Redlawsk, David P. 2006. *Bagaimana Pemilih Putuskan;* *Pengolahan informasi Selama Kampanye Pemilu.*Cambridge: Cambridge University Press.

Niemi, Richard G., dkk (eds), 2011. *Kontroversi di Voting Perilaku,* Fifth Edition. Washington DC: CQ Tekan.

Platzdasch, Benhard. 2009. *Islamisme di Indonesia: Politik Berkembang Demokrasi.* Singapura: Institut Studi Asia Tenggara.

Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* . Jakarta: Ghalia Indonesia

Schaffer, Frederic Charles (ed). 2007. *Pemilihan Dijual; Penyebab dan Konsekuensi Vote Membeli* . Manila: Ateneo De Manila University Press

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Reseach Desain* , Alfabeta Bandung

Ward, Gene, dkk. 2003. *Uang dalam Politik Handbook: Sebuah Panduan untuk Meningkatkan Transparansi Demokrasi muncul* . Publikasi teknis Series. Washington: USAID

Woshinsky, Oliver. H. 2008. *Politik Menjelaskan: Budaya, Lembaga, dan Perilaku Politik* , New York: Routledge

Zuckerman, Alan S (ed). 2005. *The Social Logika Politik: Jaringan pribadi sebagai Konteks untuk Perilaku Politik* . Philadelphia: Temple University Press

**JURNAL**

Bartels, Larry M. 2000. “Partisanship and Voting Behaviour 1952-1996, *“American Journal of Political Science*, Vol. 44, No.1 ( Jan 2000), hal. 35-50

Bratton, Michael. 2008. “Vote Buying and Violence in Nigerian Election Campaign”. *Working Paper No 99*. Afro Barometer, June 2008.

Bird, Kelly dan Hill. 2007. “Making Trade Policy in a New Democracy after a Deep Crisis: Indonesia, “*Economics RSPAS Working Papers 2007-01*, Australian National University.

Brusco, Valeria; nazareno, Marcelo and Stokes, Susan C. 2004. “Vote Buying in Argentina”, *Latin American Research Review*, Volume 39 Nomor 2 June 2004, hal: 66-88

Buehler, Michael dan Tan, Paige. 2007. “Party –Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of The 2005 Regional Elections in Gowa South Sulawesi Province”. *Journal INDONESIA* Nomor 84, October 2007, hal: 41-69

Fox, Jonathan. 1994 “ The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship; Lessons from Mexico*,” World Politics*, Volume 46 Nomor 2 hal 151-184, Juli 1994

Kristiadi, J.1996 “Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia”. *Prisma*, No 3 hal 73-91, Maret 1996

Liddle, William dan Mujani, Syaiful. 2007. “Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behaviour in Indonesia. “*Comparative Political Studies*, Volume 40 Nomor 7, hal 832-857.

Liddle, William dan Mujani, Syaiful. 2010. “Indonesia: Personalities, Parties and Voters” *Journal of Democracy*, Volume 21 No 2, hal, 35-49

Schaffer, F.C and Schedler, A. 2007, “What is Vote Buying”, in F.C. Schaffer (ed), *Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 17-30.

Stokes, Susan C. “Pervence Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina” *American Political Science Review*, Volume 99 No 3 tahun 2005, hal 315 -325.

Taqwa M. Ridhah dan Usman, Sunyoto. 2004. “Perilaku Memilih dan Politik Kepartaian pada Pemilu 1999; *SOSIOSAINS* Volume 17 Nomor 3, Juli 2004.

Vicente, Pedro C dan Wantchekon, Leonard. 2009. “Clientelism and Vote Buying: Lessons from Field Experiments In African Elections”. *The Oxford Review of Economic Policy*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2009, hal:292-305

**DOKUMEN**

Indikator Politik Indonesia, 2013. *Sikap Dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang* , Survei Nasional Maret 2013.

LPPM Universitas AlMuslim Kabupaten Bireuen Aceh, 2015. *Uang Politik hearts Pemilu 2014 di Kabupaten Bireuen Aceh.*KIP kabupaten Bireuen Aceh Dan LPPM Universitas AlMuslim.

Nurdin, Ali, 2014. *Politik Uang Dan Perilaku Memilih hearts Pemilihan Gubernur Banten 2011 di Kabupaten Pandeglang* . Disertasi Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.

KPU Kabupaten Bandung Barat, 2014. Praktek Politik Uang PADA Pemilu Legislatif 2014, Studi KASUS di Kabupaten Bandung Barat

Tim Survey internal (TSI), 2014. *Laporan Peta Politik Kabupaten Way Kanan hearts Pemilukada Tahun 2015,* Survei dilaksanakan bulan Juli 2014

Tim Survey internal (TSI), 2015. *Laporan Survey Peta Politik Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015,* Survei dilaksanakan bulan November 2015

Tim Survey internal (TSI), 2016. *Laporan Rekap Survey Peta Politik Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Pringsewu Tahun 2017* , Survei dilaksanakan bulan Februari 2016.